

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian di Indonesia merupakan hal penting dan perlu adanya perhatian. Terdapat tiga badan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Dan Badan Usaha Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan yang kegiatannya melandaskan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 mengatakan, perekonomian merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang artinya produksi dilakukan oleh semua, baik pimpinan maupun anggota. kehadiran koperasi diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat untuk mengembangkan sektor produktifnya (Prasetiawan, 2015).

Pada tahun 2014, sekitar 54,3 persen koperasi yang aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tahun 2013 sampai 2019 koperasi di Indonesia meningkat dengan rata-rata 4,2 persen unit koperasi dan 4,1 persen anggota. (sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2014) Dalam pemerintahan Indonesia, pemerintah memiliki tugas dalam pembangunan dan pengembangan koperasi yaitu dengan mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, profesionalisme pengelolaan koperasi perlu ditingkatkan terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam badan usaha seperti koperasi dan usaha kecil menengah lainnya masih kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Karena dalam pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan informasi, baik mengenai perkembangan usaha, kendala yang dihadapi serta dapat menentukan

kebijakan dan keputusan bagi pengelola usaha.

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban selama satu periode akuntansi dan laporan keuangan ini dapat dipakai untuk menilai hasil kerja koperasi. Dalam pengelolaan keuangan yang baik tentunya, perlu adanya standar dalam penyusunan laporan keuangan yang berlaku sehingga adanya keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Standar pelaporan keuangan untuk koperasi diatur didalam Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengan lingkup SAK ETAP, maka standar ini digunakan oleh entitas akuntabilitas tanpa publik yang artinya entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan laporan keuangan yang diterbitkan untuk tujuan umum atau bagi pengguna eksternal. Dengan ditetapkan standar tersebut diharapkan koperasi mampu menerapkan dan menyesuaikan apa yang telah diatur di dalamnya, sehingga tercipta koperasi yang transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggota maupun masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian pada koperasi Sidomandiri Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang didirikan pada tahun 2013 dengan badan hukum 444/BH/XVI.14/IV2013 yang beralamat di Dusun Tambakasri Wetan, RT/RW 027/004 desa Sidoasri-Sumbermanjing Wetan. KSU Sidomandiri merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan seperti simpan-pinjam, grosir sembako dan grosir LPG. Koperasi ini tidak beranggotakan syarat khusus melainkan semua masyarakat Desa Sidoasri bisa bergabung di koperasi ini.

Adapun informasi dari hasil penelitian terdahulu yang menyajikan laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK ETAP. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap badan usaha harus menerapkan standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di KSU Sidomandiri-Sumbermanjing Wetan dengan alasan penyusunan laporan

keuangan koperasi belum sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu SAK ETAP. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian penerapan SAK ETAP di koperasi Sidomandiri Sumbermanjing Wetan.

## **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu “Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atas penyajian laporan keuangan pada koperasi Sidomandiri kecamatan Sumbermanjing Wetan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pada koperasi Sidomandiri atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti agar dapat memahami laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yaitu SAK ETAP dan dapat menjadi informasi bagi peneliti berikutnya untuk menunjang penelitian.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini dalam aspek praktis diharapkan:

1. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi koperasi dalam mengimplementasikan dan menyajikan laporan keuangan koperasi sesuai SAK ETAP.
2. Dapat memperbaiki kelemahan standar yang diterapkan oleh koperasi.